

KONTRIBUSI BAWASLU KOTA BENGKULU DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILU 2024

Nedy Ramadhan Syaputra⁽¹⁾ Rosidin⁽²⁾ Rekho Adriadi⁽³⁾

Titi Darmi⁽⁴⁾

⁽¹⁻⁴⁾Universitas Muhammadiyah Bengkulu

edyramadhan52@gmail.com

ABSTRAK

This study aims to analyze the role of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Bengkulu City in implementing the supervision of the 2024 Simultaneous Election and identify the obstacles faced. The research method used is a qualitative approach with a case study type. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, observation, and documentation, with triangulation techniques to test the validity of the data. The results of the study indicate that the Bengkulu City Bawaslu carried out supervision actively, participatory, and adaptively through preventive, repressive, and educational approaches. Supervision was carried out directly in the field and digitally using the SIWASLU system. However, there were obstacles in terms of the number of supervisors, budget limitations, political pressure, and low public participation. This study suggests strengthening human resource capacity, utilizing technology, and increasing public political literacy to increase the effectiveness of election supervision.

Keywords: Bawaslu, election supervision, democracy, Bengkulu City, 2024 Election

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme utama dalam sistem demokrasi yang merepresentasikan kehendak rakyat dalam memilih wakil-wakil dan pengambil kebijakan publik. Pemilu menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan legitimasi politik yang kuat. Oleh karena itu, proses Pemilu harus dilaksanakan secara jujur, adil, transparan, dan bebas dari segala bentuk manipulasi agar hasilnya dapat diterima secara luas oleh masyarakat (Hamdi, 2024). Namun, dalam praktiknya, proses Pemilu masih menghadapi berbagai kendala berupa pelanggaran seperti politik uang, intimidasi terhadap pemilih, kecurangan administrasi, dan penyebaran informasi yang tidak benar atau disinformasi. Hal ini berpotensi mengurangi kualitas demokrasi dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hasil Pemilu (Koesworo, 2024). Oleh karena itu, peran pengawasan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses Pemilu berjalan secara bersih dan berintegritas (Jurnal JPPD, 2024).

Peran Bawaslu menjadi semakin penting dan kompleks di era digital saat ini, di mana kemajuan teknologi membawa tantangan sekaligus peluang baru dalam penyelenggaraan Pemilu. Teknologi digital memberikan kemudahan akses informasi dan mempercepat proses pelaporan serta penanganan pelanggaran, tetapi juga berpotensi memunculkan risiko seperti penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat mempengaruhi opini publik dan menurunkan kualitas demokrasi (Bawaslu Bengkulu, 2024). Oleh karena itu, Bawaslu harus mampu mengadopsi inovasi teknologi serta mengembangkan pendekatan pengawasan yang partisipatif (RRI, 2024).

Kota Bengkulu dengan karakteristik sosial-politik yang khas menjadi lokasi yang strategis untuk mengkaji bagaimana Bawaslu mengoptimalkan perannya dalam pengawasan Pemilu 2024 melalui integrasi teknologi digital dan peningkatan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat sebagai pengawas tidak hanya memperkuat kontrol sosial tetapi juga menambah legitimasi sosial terhadap hasil Pemilu (Antaraneews, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai strategi pengawasan yang diterapkan oleh Bawaslu Kota Bengkulu serta memetakan tantangan dan solusi yang muncul dalam konteks lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa masalah utama yang ingin dijawab, yaitu bagaimana strategi pengawasan yang diterapkan oleh Bawaslu Kota Bengkulu dalam Pemilu 2024, bagaimana pemanfaatan teknologi digital mendukung efektivitas pengawasan tersebut, bagaimana upaya penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, serta kendala apa saja yang dihadapi bersama solusi yang diimplementasikan (Koesworo, 2024).

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi pengawasan yang diterapkan oleh Bawaslu Kota Bengkulu dalam menghadapi Pemilu 2024, mengkaji bagaimana penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, menganalisis peran serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, dan mengidentifikasi berbagai tantangan serta solusi yang diambil dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu di Kota Bengkulu (Jurnal JPPD, 2024).

Demokrasi menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan tertinggi dalam pengambilan keputusan politik, sekaligus menjamin kebebasan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara. Pemilu sebagai manifestasi demokrasi harus dijalankan secara bebas dari manipulasi agar hasilnya dapat diterima secara sah oleh masyarakat luas. Dalam kerangka demokrasi deliberatif, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu menjadi sangat penting (Hamdi, 2024).

Bawaslu sebagai lembaga pengawas independen memiliki tugas utama untuk mengawasi setiap tahapan Pemilu agar berjalan sesuai dengan peraturan dan prinsip demokrasi. Peran Bawaslu meliputi pengawasan administratif, pencegahan pelanggaran, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu yang terjadi. Efektivitas kerja Bawaslu sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki, dukungan teknologi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan (Bawaslu.go.id, 2024).

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu merupakan bentuk nyata demokrasi partisipatif yang memperkuat mekanisme kontrol sosial. Keterlibatan masyarakat ini dapat meningkatkan transparansi penyelenggaraan, mendorong akuntabilitas, dan memperluas legitimasi sosial dari hasil Pemilu. Oleh karena itu, edukasi dan fasilitasi kepada masyarakat menjadi hal yang sangat penting agar partisipasi mereka dapat berjalan dengan efektif dan berdampak positif (Antaraneews Bengkulu, 2024).

Kemajuan teknologi digital membuka peluang inovasi dalam pengawasan Pemilu melalui berbagai aplikasi pelaporan pelanggaran, monitoring secara real-time, dan penyebaran informasi yang cepat dan luas. Teknologi ini dapat mempercepat proses penanganan laporan dan meningkatkan transparansi seluruh tahapan Pemilu. Akan tetapi, tantangan terkait literasi digital masyarakat dan risiko penyebaran disinformasi harus menjadi perhatian serius agar pemanfaatan teknologi dapat benar-benar mendukung peningkatan kualitas demokrasi (Studia Legalia, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dianggap paling relevan untuk menggali pemahaman secara mendalam dan menyeluruh terhadap dinamika pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bengkulu. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna, proses, serta konteks sosial dan politik yang melatar belakangi pelaksanaan pengawasan, khususnya dalam situasi yang

kompleks dan melibatkan banyak aktor. Fokus penelitian diarahkan pada Kota Bengkulu sebagai lokasi utama, dengan pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki karakteristik sosial-politik yang representatif dalam konteks pengawasan Pemilu di daerah perkotaan. Subjek penelitian terdiri atas berbagai pihak yang memiliki peran langsung maupun tidak langsung dalam proses pengawasan, yakni anggota Bawaslu Kota Bengkulu, pengawas lapangan (Panwaslu), relawan pengawas yang direkrut dari masyarakat, serta warga yang terlibat sebagai penerima informasi sekaligus pelapor potensi pelanggaran.

Untuk memperoleh data yang kaya dan valid, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data secara triangulatif. Teknik pertama adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dilakukan terhadap informan kunci, seperti anggota Bawaslu, koordinator divisi, pengawas lapangan, serta perwakilan dari relawan dan masyarakat sipil. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan, pengalaman, strategi, serta kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan Pemilu 2024. Teknik kedua adalah observasi partisipatif yang dilakukan dengan mengikuti langsung berbagai kegiatan pengawasan, seperti patroli pengawasan masa kampanye, kegiatan sosialisasi, serta proses pelaporan dan penanganan pelanggaran. Observasi ini memungkinkan peneliti menangkap situasi nyata di lapangan, termasuk interaksi antaraktor serta respons masyarakat terhadap peran Bawaslu. Teknik ketiga adalah dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan seperti laporan resmi kegiatan pengawasan, data digital hasil pengawasan, notulensi rapat, materi edukasi, serta konten media sosial yang diproduksi oleh Bawaslu sebagai bagian dari strategi komunikasi publik mereka.

Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara tematik dan naratif. Analisis tematik dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data, seperti strategi pengawasan, pemanfaatan teknologi digital, partisipasi masyarakat, serta tantangan yang dihadapi. Sedangkan analisis naratif digunakan untuk menyusun cerita atau narasi dari pengalaman dan praktik pengawasan yang dilakukan oleh para informan dalam konteks yang spesifik dan bermakna. Melalui pendekatan ini, penelitian mampu memetakan secara komprehensif bagaimana Bawaslu Kota Bengkulu menjalankan peran strategisnya dalam pengawasan Pemilu 2024, serta bagaimana interaksi antara teknologi, partisipasi masyarakat, dan dinamika lokal berkontribusi dalam membentuk sistem pengawasan yang lebih adaptif, transparan, dan akuntabel.

HASIL

Penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Bengkulu telah memainkan peran yang sangat strategis dalam mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 melalui berbagai pendekatan pengawasan yang bersifat komprehensif dan adaptif. Pengawasan dilakukan tidak hanya dalam bentuk pengamatan langsung di lapangan, tetapi juga melalui penguatan partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi digital, dan kolaborasi lintas sektor. Strategi yang diterapkan meliputi pendekatan preventif, represif, partisipatif, serta penguatan sumber daya manusia dan teknologi informasi.

1. Strategi Preventif

Pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal dengan membangun kesadaran dan pemahaman hukum kepada masyarakat, peserta pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya. Bawaslu menyadari bahwa pengawasan yang ideal bukan hanya mengawasi, tetapi juga mencegah pelanggaran agar tidak terjadi. Sepanjang tahun 2023 hingga awal 2024, Bawaslu Kota Bengkulu menyelenggarakan lebih dari 75 kegiatan sosialisasi. Kegiatan ini dilakukan di 9 kecamatan dan menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, tokoh masyarakat, pemuka agama, hingga kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

Tabel 1
Kegiatan Preventif Bawaslu

Jenis Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Peserta
Pelatihan Pengawasan Partisipatif	30	1.250
Dialog Warga	20	800
Penyuluhan Hukum Pemilu	15	600
Diskusi Publik	10	400
Total	75	3.050

Sumber : Data diolah 2024

Program ini tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga membentuk jaringan relawan dan kader pengawas partisipatif yang dapat bertugas sebagai mata dan telinga Bawaslu di masyarakat. Pelatihan mencakup materi tentang tahapan pemilu, jenis pelanggaran, dan cara melaporkan dugaan pelanggaran.

2. Strategi Represif

Di sisi lain, strategi represif difokuskan pada penegakan hukum dan penindakan tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Bawaslu Kota Bengkulu secara aktif memantau, menerima laporan, memverifikasi, dan menindaklanjuti berbagai kasus pelanggaran selama tahapan kampanye.

Tabel 2
Distribusi Jenis Pelanggaran yang Ditangani Bawaslu

Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus	Persentase dari Total
Politik Uang	14	43.75%
Pelibatan ASN	10	31.25%
Pelanggaran Administratif	8	25.00%
Total	32	100%

Sumber : Data diolah 2024

Dari 32 kasus yang diproses, sekitar 70% berhasil ditindaklanjuti hingga tahap rekomendasi hukum kepada KPU, Kepolisian, atau pihak terkait. Penanganan dilakukan secara profesional dan akuntabel melalui proses verifikasi, investigasi, klarifikasi, dan pembentukan Tim Gakkumdu jika diperlukan.

Selain menerima laporan secara langsung di posko pengaduan, Bawaslu juga memanfaatkan aplikasi digital GOWASLU untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan dugaan pelanggaran secara real-time.

3. Penguatan SDM dan Jaringan Pengawas

Dalam rangka memperluas jangkauan pengawasan hingga ke tingkat akar rumput, Bawaslu merekrut dan melatih 130 Pengawas Kelurahan/Desa (PKD). Para pengawas ini merupakan bagian dari pengawas ad hoc yang memiliki tugas strategis di lingkungan terkecil tempat berlangsungnya pemilu.

Mereka dibekali dengan materi sebagai berikut:

- Kode Etik dan Etos Kerja Pengawas
- Teknik Pelaporan Digital melalui SIWASLU dan GOWASLU
- Penanganan Konflik Horizontal
- Strategi Komunikasi Sosial

Jaringan pengawas ini sangat penting karena TPS di Kota Bengkulu tersebar luas dengan jumlah yang relatif tinggi, sementara SDM tetap terbatas. Dengan membentuk struktur

pengawas yang kuat hingga tingkat kelurahan, pengawasan dapat dilakukan lebih responsif dan adaptif terhadap situasi lokal.

4. Inovasi Teknologi dan Digitalisasi

Dalam menghadapi era digital dan maraknya pelanggaran berbasis media sosial, Bawaslu mengintegrasikan pengawasan dengan platform digital sebagai bagian dari modernisasi sistem kerja mereka.

Tabel 3
Pemanfaatan Teknologi Digital oleh Bawaslu Kota Bengkulu

Media / Aplikasi	Capaian Kinerja
Aplikasi GOWASLU	186 laporan masuk; 82% lolos validasi awal
Media Sosial (Instagram, FB)	Engagement naik 240% menjelang pemilu
Webinar dan Sekolah Kader	1.000+ peserta webinar; 80 peserta sekolah

Sumber : Data diolah 2024

Aplikasi GOWASLU memungkinkan pelaporan disertai bukti (foto/video), status pelaporan yang dapat dipantau, serta perlindungan data pelapor. Selain itu, akun resmi media sosial digunakan secara intensif untuk menyampaikan edukasi pemilu melalui konten video, infografis, dan siaran langsung.

Salah satu program inovatif lainnya adalah “Sekolah Kader Pengawas Partisipatif”, yang melibatkan mahasiswa, aktivis perempuan, dan kelompok rentan. Kegiatan ini bertujuan membentuk pengawas komunitas yang sadar hukum, tanggap digital, dan siap turun ke lapangan.

5. Survei Internal Bawaslu

Untuk mengukur efektivitas strategi pengawasan yang telah dilakukan, Bawaslu Kota Bengkulu melakukan survei internal pada Januari 2024 terhadap 300 responden yang tersebar di seluruh kecamatan.

Tabel 4
Hasil Survei

Indikator	Persentase Responden
Mengetahui Prosedur Pelaporan Pelanggaran	78%
Siap Terlibat dalam Pengawasan Partisipatif	65%
Pernah Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Bawaslu	61%

Sumber : Data diolah 2024

Temuan ini menunjukkan adanya transformasi budaya politik masyarakat yang semakin kritis, peduli terhadap pelanggaran pemilu, serta siap menjadi bagian dari sistem pengawasan partisipatif yang inklusif.

PEMBAHASAN

1. Efektivitas Strategi Pengawasan

Strategi pengawasan yang diterapkan oleh Bawaslu Kota Bengkulu menunjukkan efektivitas yang nyata dalam mengawal proses demokrasi di tingkat lokal. Strategi preventif berhasil membangun fondasi budaya politik yang sehat melalui pelibatan masyarakat secara luas dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi. Pelatihan yang menjangkau ribuan peserta dari berbagai kalangan masyarakat membuktikan bahwa pendekatan ini mampu meningkatkan

kesadaran hukum dan pemahaman warga terhadap pentingnya pemilu yang bersih dan berintegritas. Peningkatan jumlah peserta dalam pelatihan dan program sosialisasi, ditambah tingginya partisipasi dalam program seperti "Sekolah Kader Pengawas Partisipatif", menjadi indikator bahwa masyarakat tidak lagi menjadi objek semata dalam pengawasan, melainkan subjek aktif yang turut menjaga kualitas demokrasi.

Di sisi lain, strategi represif memperlihatkan keseriusan Bawaslu dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Penanganan terhadap 32 kasus pelanggaran pemilu yang mayoritas berhasil ditindaklanjuti menegaskan bahwa Bawaslu bukan hanya simbol pengawasan, tetapi juga institusi yang berdaya tindak. Penanganan ini dilakukan secara profesional melalui tahapan klarifikasi, investigasi, dan koordinasi dengan Gakkumdu. Dampaknya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Bawaslu meningkat, sebagaimana tercermin dalam survei internal di mana 65% responden menyatakan kesiapan untuk terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif.

2. Sinergi Lintas Sektor

Keberhasilan Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan tidak lepas dari kemampuan membangun kolaborasi lintas sektor. Hubungan kelembagaan dengan Polresta Bengkulu, Kejaksaan Negeri, dan Satpol PP dibangun melalui forum koordinasi rutin yang dilakukan secara bulanan. Kolaborasi ini memfasilitasi penyelesaian kasus secara cepat, utamanya dalam situasi yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal atau pelanggaran masif saat kampanye terbuka.

Koordinasi ini menciptakan sistem pengawasan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif. Misalnya, aparat keamanan dapat mengantisipasi potensi keributan berdasarkan informasi awal dari pengawas Bawaslu, sementara kejaksaan dan kepolisian dapat langsung menindaklanjuti temuan atau laporan yang telah melewati proses klarifikasi internal.

3. Peran Teknologi dalam Pengawasan

Transformasi digital yang diadopsi Bawaslu melalui aplikasi GOWASLU dan pemanfaatan media sosial merupakan langkah signifikan dalam memperluas jangkauan pengawasan dan mempercepat proses pelaporan pelanggaran. GOWASLU mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan pelanggaran secara real-time dan terverifikasi. Selama masa kampanye, sebanyak 186 laporan diterima, dengan 82% lolos validasi awal, menunjukkan efektivitas sistem ini dalam menampung aduan publik.

Namun, penerapan teknologi ini masih menghadapi hambatan implementatif:

- Rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat menyebabkan sebagian warga kesulitan dalam menggunakan aplikasi.
- Akses internet yang belum merata menyebabkan ketergantungan pada metode pengawasan konvensional di beberapa wilayah.
- Maraknya hoaks dan disinformasi menjadi ancaman serius. Bawaslu mencatat setidaknya 12 konten hoaks yang berhasil diklarifikasi secara publik melalui kanal resmi.

Meskipun tantangan ini cukup signifikan, langkah Bawaslu dalam menyelenggarakan pelatihan literasi digital, penggunaan media sosial edukatif, serta peningkatan kapasitas pengawas menunjukkan respons yang progresif terhadap tuntutan zaman.

4. Tantangan Sumber Daya Pengawasan

Dalam praktiknya, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) masih menjadi kendala yang cukup krusial. Dengan lebih dari 500 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Kota Bengkulu, jumlah pengawas yang tersedia, terutama pengawas ad hoc, belum ideal.

Beberapa hambatan yang ditemukan antara lain:

- Rasio pengawas terhadap TPS masih terlalu tinggi, menyebabkan pengawas harus mengawasi lebih dari satu lokasi.

- Pelatihan yang singkat dan minimnya pengalaman membuat sebagian pengawas belum siap menghadapi kompleksitas pelanggaran di lapangan.
- Adanya tekanan dari aktor politik, baik dalam bentuk intimidasi maupun intervensi halus, dapat memengaruhi independensi pengawasan.

Untuk menjawab tantangan ini, Bawaslu telah melakukan pelatihan berkelanjutan, memberikan insentif, serta menjalin kerja sama dengan LSM dan tokoh masyarakat sebagai bentuk penguatan jaringan informal pengawasan.

5. Relevansi Temuan dengan Teori

Temuan dalam penelitian ini sangat relevan dengan Teori Peran, di mana lembaga seperti Bawaslu tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan normatif, tetapi juga memiliki fungsi edukatif dan responsif. Bawaslu menjalankan tiga fungsi utama:

1. Edukasi Masyarakat (Partisipatif): melalui sosialisasi, pelatihan, dan pelibatan relawan.
2. Penindakan Hukum (Represif): melalui klarifikasi kasus dan koordinasi dengan Gakkumdu.
3. Monitoring Digital (Adaptif): dengan mengembangkan GOWASLU dan media sosial edukatif.

Selanjutnya, penelitian ini juga memperkuat nilai-nilai Good Governance, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Sistem pelaporan yang terbuka, klarifikasi kasus yang terdokumentasi, dan partisipasi publik yang meningkat menunjukkan bahwa prinsip tata kelola yang baik mulai terwujud dalam praktik pengawasan pemilu. Dari sisi keterlibatan publik, temuan ini memperkuat penerapan teori demokrasi partisipatif, di mana warga tidak hanya dilibatkan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas aktif dalam sistem demokrasi. Semakin tinggi partisipasi dalam pengawasan, semakin kuat pula legitimasi hasil pemilu di mata masyarakat.

KESIMPULAN

Bawaslu Kota Bengkulu telah menjalankan peran strategis secara efektif dalam pengawasan Pemilu 2024 melalui kombinasi strategi preventif dan represif, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan partisipasi masyarakat. Pendekatan yang sinergis ini meningkatkan efektivitas pengawasan, mempercepat penanganan pelanggaran, dan memperkuat legitimasi demokrasi lokal. Meskipun ada tantangan signifikan, langkah inovatif dan kolaboratif yang ditempuh menunjukkan potensi besar untuk menciptakan Pemilu yang lebih bersih, jujur, dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abqa, M. A. R., Mulyadi, R., Rohman, Amalia, Tanesab, J., Junaidi, (2023). *Politik hukum Pemilu*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Afifuddin, M. (2020). *Membumikan pengawasan Pemilu: Mozaik pandangan dan catatan kritis dari dalam*. Elex Media Komputindo.
- Ahmad Ziruddin, Kholilur Rahman, & Maulidi, (2023). *Merawat negara hukum*. Guepedia.
- Akbar, T. (2022). Efektivitas pengawasan Bawaslu Kota Tangerang Selatan di masa pandemi: Studi kasus Pilkada Kota Tangerang Selatan tahun 2020. [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah].
- Alaydrus, A., Jamal, M. S., Nurmiyati, N., (2023). *Pengawasan Pemilu: Membangun integritas, menjaga demokrasi*. Penerbit Adab.
- AntaraneWS Bengkulu. (2024). Bawaslu kolaborasi dengan OPD Bengkulu awasi kampanye digital. <https://bengkulu.antaraneWS.com/berita/371798/bawaslu-kolaborasi-dengan-opd-bengkulu-awasi-kampanye-digital>
- Ardianto, R., & Gloria, R. (2020). Sekilas sejarah Bawaslu dari awal terbentuk. *Bawaslu RI*. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk>

- Basuki, U. (2020). Parpol, Pemilu dan demokrasi: Dinamika partai politik dalam sistem pemilihan umum di Indonesia perspektif demokrasi. *Kosmik Hukum*, 20(2), 81–94.
- Bawaslu Provinsi Bengkulu. (2024). Rapat koordinasi nasional pengawasan siber. <https://bengkulu.bawaslu.go.id/bawaslu-provinsi-bengkulu-ikuti-rapat-koordinasi-nasional-pengawasan-siber-pada-pemilihan-serentak-tahun-2024>
- Fadillah, M. (2022). Demokrasi dan keterlibatan warga: Pendekatan Habermasian dalam konteks Pemilu Indonesia. *Kompas Media Nusantara*.
- Fauziah, A. R., Bimantara, C. S., Bahrenina, K. A., & Pertiwi, Y. E. (2023). Meningkatkan kualitas Pemilu serentak tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi digital. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(1), 51–75.
- Gultom, M. M. (2023). Pendidikan pengawasan Pemilu bagi masyarakat untuk mewujudkan Pemilu berintegritas. *Ensiklopedia Education Review*, 5(1), 6–12.
- Hamdi, S. (2024). Reformasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penegakan hukum Pemilu di era demokrasi kontemporer. *Journal of Studia Legalia*, 5(2). <https://studialegalia.ub.ac.id/index.php/studialegalia/article/download/119/82>
- Imawan, R. P. (2020). Kerangka evaluasi Pilkada: Evaluasi Pilkada serentak melalui kerangka integritas Pemilu. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 3(2), 159–182.
- Indriany, W., & Achmad, A. (2021). Implementasi peran Badan Pengawas Pemilu terhadap penegakan tindak pidana Pemilu (politik uang) pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*. <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/58457>
- JPPD. (2024). Peran Bawaslu Kota Bengkulu dalam pengawasan Pemilu 2024. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Daerah*. <https://jppd.org/index.php/jppd/article/view/133>
- Koesworo, A. (2024). Strategi Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*. <https://eprints.ipdn.ac.id/19852/>
- RRI. (2024). Bawaslu Kota Bengkulu awasi hoaks di media sosial. <https://www.rri.co.id/daerah/479670/bawaslu-kota-bengkulu-awasi-hoaks-di-media-sosial>